

Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Banyuwangi Regency Government Administration Reform in Improving Economic Growth and Job Opportunities

Nanang Haryono¹

¹Departemen Administrasi, Fisip, Universitas Airlangga,
E-mail: nanang.haryono@fisip.unair.ac.id

Abstract

Local government administrative reform in the era of regional autonomy was greatly influenced by leadership, local political conditions, bureaucracy, and state-society relations. The purpose of this paper is to explain the administrative reform of the local government of Banyuwangi Regency for the 2016-2019 period which is able to increase economic growth and job opportunities to improve people's welfare. The practical implications of this paper can be information for other local governments in Indonesia in implementing administrative reforms for the welfare of the community. The results obtained by the reform process in Banyuwangi are dominant in the leadership role of regional heads. Changes occurred in the institutional, operational, and procedural aspects of public services. Public sector management is community-oriented with an emphasis on the role of civil society, improving quality and increasing economic productivity. The conclusion is that the administrative reform of the Banyuwangi local government is top-down with the dominance of the role of the regional head as a guide. Changes occur in institutional, operational and procedural aspects to improve public services. The position of the bureaucracy in the innovation process as a policy implementer.

Keywords: *Government reform, local government, economic growth, job opportunities*

Abstrak

Reformasi administrasi pemerintah lokal era otonomi daerah sangat dipengaruhi kepemimpinan, kondisi politik lokal, birokrasi, dan hubungan negara-masyarakat. Tujuan paper ini adalah menjelaskan reformasi administrasi pemerintah lokal Kabupaten Banyuwangi periode 2016-2019 yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi praktis paper ini dapat menjadi informasi pemerintah lokal lain di Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diperoleh proses reformasi di Banyuwangi dominan peran kepemimpinan kepala daerah. Perubahan-perubahan terjadi pada aspek institusional, operasional pemerintah, dan prosedural pada pelayanan publik. Manajemen sektor publik berorientasi pada masyarakat dengan penekanan peran civil society, peningkatan kualitas dan peningkatan produktivitas ekonomi. Kesimpulannya adalah reformasi administrasi pemerintah lokal Banyuwangi bersifat top-down dengan dominasi peran kepala daerah sebagai pengarah. Perubahan

Haryono: "Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi..."

terjadi pada aspek institusional, operasional dan prosedur untuk meningkatkan pelayanan public. Kedudukan birokrasi pada proses inovasi sebagai implementator kebijakan.

Kata kunci: Government reform, pemerintah lokal, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja

Pendahuluan

Pemerintah lokal di Indonesia pada era otonomi daerah didorong untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbekal luasnya kewenangan pemerintah lokal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hakikatnya pemerintah daerah dapat melaksanakan inovasi pada urusan wajib maupun urusan konkuren yang melekat pada pemerintah lokal. Inovasi dapat dilakukan pada penyusunan program dan kegiatan yang diharapkan meningkatkan kinerja pembangunan yang berimplikasi apda peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki 4 program yang masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan-RB (<https://surabaya.tribunnews.com>). keempat inovasi tersebut adalah (a) Rantang kasih (memuliakan lansia miskin terlantar sebatangkara) - pengentasan kemiskinan; (b) CHIPS, Primadona Kami (prioritas melayani dan solusi nasib keluarga miskin) - kesehatan; (c) Banyuwangi Festifal - pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (d) Banyuwangi mall (banyuwangi-mall.com) - pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pada tahun sebelumnya yaitu 2018 Banyuwangi mendapat penghargaan sebagai 'Kabupaten Terinovatif' dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) 2018. Tercatat ada 341 inovasi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada paper ini adakan dibahas bagaimana reformasi administrasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam inovasi yang terkait pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dua inovasi yang masuk kategori tersebut adalah banyuwangi festifal dan banyuwangi mall.

Banyuwangi Festival (B-Fest) adalah agenda wisata yang digelar sejak 2012. Menurut Abdullah Azwar Anas B-Fest bukan sekedar agenda wisata, namun ini adalah cara Banyuwangi melakukan konsolidasi di bidang budaya, infrastruktur, masyarakat, dan ekonomi. Proses pelaksanaan event B-Fest sinergi kerjasama birokrat, masyarakat, swasta, hingga TNI/Polri. Inovasi Banyuwangi-Mall.Com adalah situs belanja digital

pertama di Indonesia yang dikelola pemerintah kabupaten. Tujuannya adalah mengoptimalkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari aspek pemasaran di Kabupaten Banyuwangi (<https://www.tribunnews.com/>).

Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis berada di paling ujung timur pulau Jawa. Banyuwangi memiliki luas wilayah 5,782.50 km². Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2,839 Rukun Warga dan 10,569 Rukun Tetangga (<https://www.banyuwangikab.go.id>). Jumlah penduduk Banyuwangi berjumlah 1.735.845 jiwa (tahun 2018). Jumlah Penduduk terserap pada sektor pertanian/ peternakan/ perikanan dan wiraswasta. Berikut tabel pekerjaan penduduk Banyuwangi:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	%
1	2	3	4
1	Belum /Tidak Bekerja	326,517	18.81
2	Mengurus Rumah Tangga	201,916	11.63
3	Pelajar / Mahasiswa	259,611	14.96
4	Pertanian/Peternakan/Perikanan	332,093	19.13
5	Perdagangan	48,357	2.79
6	Industri	3,021	0.17
7	Jasa Kemasyarakatan	4,818	0.28
8	Konstruksi	2,799	0.16
9	Pemerintahan	39,441	2.27
10	Swasta	233,805	13.47
11	Wiraswasta	283,041	16.31
12	Lainnya	426	0.02
JUMLAH		1,735,845	100.00

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dalam <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ketenagakerjaan.html>

Berdasarkan data diatas 54,58% masyarakat Banyuwangi bekerja pada sektor informal, swasta dan 2,27 % pada pemerintahan. Inovasi Banyuwangi Festival dan banyuwangi mall telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat Banyuwangi.

Inovasi kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada peningkatan ekonomi lokal menunjukkan trend positif. Jumlah inovasi yang cukup banyak pada Kabupaten Banyuwangi cenderung difokuskan pada bidang ekonomi terutama ekonomi kreatif.

Haryono: "Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi..."

Inovasi banyuwangi festival dan banyuwangi mall juga memiliki implikasi meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif, dan mengangkat kearifan lokal. Berikut data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi 2010-2018 sebagai gambaran pertumbuhan positif hasil pembangunan.

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi 2010-2018

No	Keterangan	TAHUN								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Banyuwangi	6.38	6.95	7.24	6.71	5.91	6.01	5.38	5.60	5.84
2	Provinsi Jawa Timur	6.31	6.44	6.64	6.08	5.86	5.49	5.55	5.72	5.65
3	Nasional	6.10	6.50	6.23	5.78	5.02	4.79	5.02	5.06	5.17

sumber data: banyuwangi dalam angka 2010-2018 dan <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ekonomi.html> (data diolah)

Berdasarkan table 1 diatas, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada tahun 2018 berada di angka 5,84 diatas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Nasional mencapai angka 5.17 dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur sebesar 5.65.

Berdasarkan inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada program Banyuwangi Festival dan Banyuwangi mall menarik untuk dikaji bagaimana reformasi administrasi yang telah diimplementasikan Bupati Abdullah Azwar Anas pada rentang pemerintahan periode ke II tahun 2016-2019. Implikasi praktis paper ini dapat menjadi informasi pemerintah lokal lain di Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diajukan pertanyaan sebagai berikut: (a) Bagaimana reformasi administrasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja?;

Analisis dan Pembahasan

Good governance pada Pemerintahan Lokal

Prinsip-prinsip *good governance* mengacu pada proses administrasi publik untuk memaksimalkan kepentingan publik. Aspek penting membangun *good governance* adalah manajemen kolaboratif pada kehidupan publik yang dilakukan oleh negara, warga negara dan swasta. Bank Dunia dalam sebuah laporan berjudul *governance and development* (1992) menetapkan definisi tata kelola yang baik sebagai: "the manner in

which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development". (Cara dimana kewenangan dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan). Definisi lain *good governance* disampaikan *The Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) pada sebuah dokumen berjudul *Participatory Development and Good Governance* (1995). OECD menyoroti bahwa definisi luas yang diberikan oleh Bank Dunia terkait *good governance* mencakup peran otoritas publik dalam membangun lingkungan di mana operator ekonomi berfungsi dan dalam menentukan distribusi manfaat serta sifat hubungan antara penguasa dan yang diperintah. Selama tahun 1990-an, mendukung pendekatan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) (Woods 2000: 824) menekankan bahwa agenda tata kelola yang baik mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, partisipasi, dan kepemilikan. Pendapat lain Vyas dan Aktan meredefinisi elemen *good governance* diantaranya adalah:



Gambar 1

Components of Good Governance

Sumber: Shikha Vyas-Doorgapersad dan Coskun Can Aktan, 2017

Penerapan *good governance* pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi-efektifitas, keadilan, partisipasi, kompetisi-market forces, dan penggunaan teknologi informasi komunikasi. Pendorong utama dalam proses penerapan prinsip *good governance* di Kabupaten Banyuwangi terletak pada kepala daerah yang didukung partisipasi masyarakat. Dapat dikatakan proses penerapan *good governance* di

Haryono: "Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi..."

Banyuwangi didukung "partisipasi" masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak dan yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Memperhatikan dinamika yang ada partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Penerapan prinsip-prinsip good governance diimplementasi untuk mensukseskan inovasi layanan perijinan, pemberian beasiswa, gerakan sedekah oksigen, inovasi layanan kependudukan, konsep penataan ruang, serta memaksimalkan keunggulan potensi sumber daya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan inovasi lain di Kabupaten Banyuwangi. Pada proses membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik prosesnya berangkat dari diskusi persoalan dan berorientasi pada konsensus. Pada konteks ini semua individu dapat mencapai kesepakatan untuk mendukung keputusan demi kepentingan terbaik masyarakat. Pemerintahan demokratis yang baik pada dasarnya adalah kepatuhan terhadap aturan hukum. Aturan hukum menuntut agar masyarakat dan masyarakat sipil mematuhi hukum. Ini juga menuntut agar pemerintah bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang ditentukan oleh hukum.

Keberhasilan inovasi Banyuwangi masuk dalam top 99 tahun 2019 tidak terlepas dari proses keterbukaan, akuntabilitas dan transparansi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait dalam mendukung keberhasilan program. Secara definisi akuntabilitas merupakan landasan dari tata pemerintahan yang baik berarti bahwa pejabat publik yang dipilih memiliki kewajiban untuk menjelaskan keputusan dan tindakan mereka kepada warga negara. Proses tersebut juga didukung Keterbukaan dan transparansi sebagai indikator tata kelola yang baik, berarti informasi harus tersedia secara bebas dan langsung dapat diakses oleh warga.

Reformasi Administrasi Pemerintah Banyuwangi 2016-2019

Reformasi administrasi menjadi salah satu pilihan kegiatan pemerintah yang banyak dilakukan untuk menjawab persoalan, memperbaiki kinerja, menyesuaikan dengan perubahan sosial dan politik di masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan. Definisi reformasi administrasi merujuk Chapman and Greenway adalah “ *a process of changes in the administrative structures or procedures within the publik services because they have become out of line with the expectations of the social and political environment*” (Proses perubahan dalam struktur administrasi atau prosedur dalam

layanan publik karena mereka menjadi tidak sesuai dengan harapan lingkungan sosial dan politik) (Chapman and Greenway, 1980). Pada definisi lain Farazmand menyebutkan, *administrative reform often is referred to as modernization and change in society to effect social and economic transformation* (reformasi administrasi sering disebut sebagai modernisasi dan perubahan dalam masyarakat untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi) (Farazmand, 1999a). Pada konteks paper ini reformasi administrasi didefinisikan sebagai proses perubahan dalam struktur administrasi atau prosedur dalam layanan publik karena tidak sesuai dengan harapan lingkungan sosial dan politik masyarakat.

Dinamika persoalan pada sebagian pemerintah lokal di Indonesia diantaranya lamban, tidak inovatif, ketidakstabilan dan arah kebijakan yang tidak jelas. Banyuwangi merupakan salah satu pemerintah lokal yang lebih unggul dalam proses reformasi administrasi sektor pemerintah. Berbagai perubahan melalui program dan kebijakan dibuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memajukan ekonomi, mempermudah pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Farazmand yang menyebutkan upaya-upaya reformasi dan reorganisasi pemerintah lokal dilaksanakan karena upaya untuk peningkatan ekonomi, perluasan pasar bagi ekonomi lokal, akomodasi kepentingan dan sebagainya. Keberhasilan reformasi berhubungan langsung dengan legitimasi rezim dan persepsi populer tentang keaslian reformasi (Farazmand, 1989, 1998a).

Secara teoritis reformasi administrasi Kabupaten Banyuwangi dapat dikategori sebagai top-down models. Model reformasi pemerintahan top-down secara luas bertujuan pada aspek proses. Model-model ini mengasumsikan bahwa aktor-aktor tertentu elit, individu yang kuat, atau otoritas memiliki tujuan tertentu dalam mengejar reformasi dan pengorganisasian kembali. Model-model ini mengasumsikan bahwa para pemimpin politik melihat masalah atau mengembangkan ide-ide inovatif dengan mereformasi serta mengatur kembali sektor publik. Prinsip model ini adalah kebutuhan melaksanakan reformasi dan re-organisasi ditentukan di atas (elit). Menurut Pollitt (1984), pendekatan ini adalah pendekatan "tradisional, pragmatis" untuk mesin pemerintah.

Pembahasan pada bagian ini akan difokuskan pada reformasi administrasi Pemerintah Banyuwangi 2016-2019. Periode ini adalah kali ke 2 Bupati Abdullah Azwar Anas terpilih secara demokratis. Proses reformasi yang dilaksanakan pada banyak aspek.

Haryono: "Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi..."

Reformasi ditopang dengan visi kepemimpinan yang jelas yaitu "terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Visi tersebut dijabarkan dalam misi dan diimplementasi dalam kebijakan serta program. Proses implementasi kebijakan dan program dilaksanakan dengan target yang terukur. Berikut adalah area reformasi administrasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan Petumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja:

Tabel 3

Area reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten banyuwangi dalam meningkatkan Petumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Area Reformasi	Bentuk Reformasi
Struktural / institusional	Restrukturisasi institusi birokrasi pemerintah kabupaten Banyuwangi
Prosedur	Mempersingkat prosedur layanan publik, membangun layanan perijinan satu pintu melalui mall pelayanan publik, menerapkan layanan berbasis jaringan
Manajemen Sumber daya Manusia	Meningkatkan kinerja ASN pemerintah kabupaten banyuwangi; meningkatkan kemampuan masyarakat.
Fokus Kualitas dan produktifitas	Peningkatan kualitas layanan dengan kecepatan kerja
Penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)	Inovasi Banyuwangi Festifal dan banyuwangi mall dalam proses implementasi menggunakan TIK. Banyuwangi mall portalnya berbasis TIK. serta inovasi yang lain.

Sumber data: primer analisis.

Aspek penting dalam reformasi administrasi adalah reformasi birokrasi. Birokrasi merupakan pengimplementasi semua kebijakan yang putusan oleh kepala daerah. Agenda reformasi birokrasi Kabupaten Banyuwangi terencana dan tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022. Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2018-2022 adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja. Sasaran reformasi pada tiga aspek yaitu: (a). Birokrasi yang bersih dan

akuntabel; (b). Birokrasi yang efektif dan efisien;(c). Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Terdapat 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Tabel 4
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No	Area perubahan	Hasil yang diharapkan
1	Organisasi	Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2	Tatalaksana Sistem	proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3	Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4	Sumber daya manusia	Aparatur Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8	Mental Aparatur atau Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set)	Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sumber data: Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022

Haryono:"Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi..."

Perubahan-perubahan reformasi administrasi pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi terjadi pada aspek institusional, operasional pemerintah, dan prosedural. Manajemen sektor publik yang diterapkan kepala daerah berorientasi pada kemampuan berkompetisi pada pasar global dengan penekanan peran civil society, peningkatan kualitas dan peningkatan produktivitas. Pemerintah Banyuwangi era Bupati Anas dalam pemerintahannya melibatkan stakeholder tokoh masyarakat dan para kyai untuk mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dengan memperhatikan kondisi sosial kultural masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang termasuk wilayah tapal kuda dimana peran kyai sangat besar dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Relasi ini dapat dijelaskan dengan teori patron-klien. Patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Pada konteks ini yang disebut patron adalah kyai dan yang dimaksud klien adalah masyarakat. Hal ini karena pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, seorang kyai berperan sebagai stakeholder yang menentukan keberhasilan program-program pemerintah.

Kesimpulan

Reformasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan manajemen pemerintahan dan pemberian layanan, pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan. Pemerintahan lokal Kabupaten Banyuwangi telah mengalami perubahan dan transformasi sejak kepemimpinan bupati Abdullah Azwar Anas. Upaya mewujudkan prinsip-prinsip good governance dilaksanakan dengan perubahan-perubahan pada aspek institusional, operasional pemerintah, dan prosedural. Manajemen sektor publik yang diterapkan kepala daerah berorientasi masyarakat yang mampu kompetisi pada pasar global dengan penekanan pada civil society, kualitas dan peningkatan produktivitas, pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan efektivitas

pemerintah dalam layanan publik, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan daya tanggap penyedia layanan.

Pelibatan masyarakat menjadi pilihan dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan sosial dan ekonomi melalui kerangka demokrasi untuk stabilitas dan kemajuan sosial ekonomi. Pemerintah Banyuwangi era Bupati Abdullah Azwar Anas dalam pemerintahannya melibatkan stakeholder tokoh masyarakat dan kyai. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dengan memperhatikan kondisi sosial kultural Kabupaten Banyuwangi yang termasuk wilayah tapal kuda dimana peran kyai sangat besar dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pada masyarakat Banyuwangi secara kultural dalam kehidupan pondok pesantren relasi parton-klien dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kyai dan santri. Secara kultural sistem Pendidikan pesantren menjadi bagian dari masyarakat Banyuwangi.

Nilai-nilai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berupaya diraih melalui reformasi dilaksanakan dengan perbaikan manajemen pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat, transparansi dan keterbukaan, dalam proses politik pemerintahan dan administrasi. Pada hakikatnya perubahan reformasi pada pemerintah lokal untuk memperluas cakupan desentralisasi dan demokrasi. Lebih-lebih pada era saat ini pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung.

Kelemahan reformasi di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terjadi pada pemerintahan lokal lain di Indonesia pasca diterapkannya otonomi daerah tertumpu pada figure kepemimpinan kepala daerah. Inovasi-inovasi yang diimplementasi pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi didorong dari kepala daerah. Keberadaan birokrasi yang seharusnya menjadi kekuatan dalam memberi pelayanan belum cukup kuat untuk melakukan perubahan. Dengan demikian tata pemerintah yang baik yang terjadi pada pemerintah lokal Banyuwangi sangat bergantung pada figure kepemimpinan kepala daerah.

Daftar Pustaka

Aktan, Coşkun Can. (1995). *Optimal Devlet*, İstanbul: TÜSIAD Yayını. (Turkish) dalam Shikha Vyas-Doorgapersad dan Coskun Can Aktan *Progression From Ideal State To Good Governance: An Introductory Overview. International Journal Of*

Haryono: "Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi..."

- Business And Management Studies*. Vol 9, No 1, 2017 ISSN: 1309-8047. akses <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/440184>.
- Chapman, R.A. and Greenway, J.R. (1980). *The Dynamics of Administrative Reform*. London: Croom-Helm
- Daftar Top 99 Sinovik Tahun 2019. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6045-daftar-top-99-sinovik-tahun-2019>. akses 16 Desember 2019
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dalam <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ketenagakerjaan.html>.
- Farazmand, Ali. (1989). *The State, Bureaucracy, and Revolution in Modern Iran: Agrarian Reform and Regime Politics*. New York: Praeger.
- . (1998a). "Failure of Administrative Reform and the Revolution of 1978–79 in Iran." *Korean Review of Public Administration* 3(2): 93–123.
- . (1999a). "Administrative Reform in Global Perspective: A Symposium." *International Journal of Public Administration* 22(4): 1–9
- Haorrahman. Empat Inovasi Banyuwangi Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB.
- jppn. Punya 341 Inovasi, Banyuwangi Paling Inovatif se-Indonesia dalam <https://www.jpnn.com/news/punya-341-inovasi-banyuwangi-paling-inovatif-se-indonesia>. akses 16 Desember 2019.
- Kabupaten Banyuwangi kependudukan dalam <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html>.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 *Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022*.
- Politt, C. (1984). *Manipulating the Machine: Changing the Patterns of Ministerial Departments, 1960–83*. London: Allen & Unwin.
- Sugiyarto. Banyuwangi-Mall.Com Situs Belanja Digital Pertama di Indonesia yang Dikelola Pemkab. dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2016/08/15/banyuwangi-mallcom-situs-belanja-digital-pertama-di-indonesia-yang-dikelola-pemkab>. akses 16 Desember 2019.

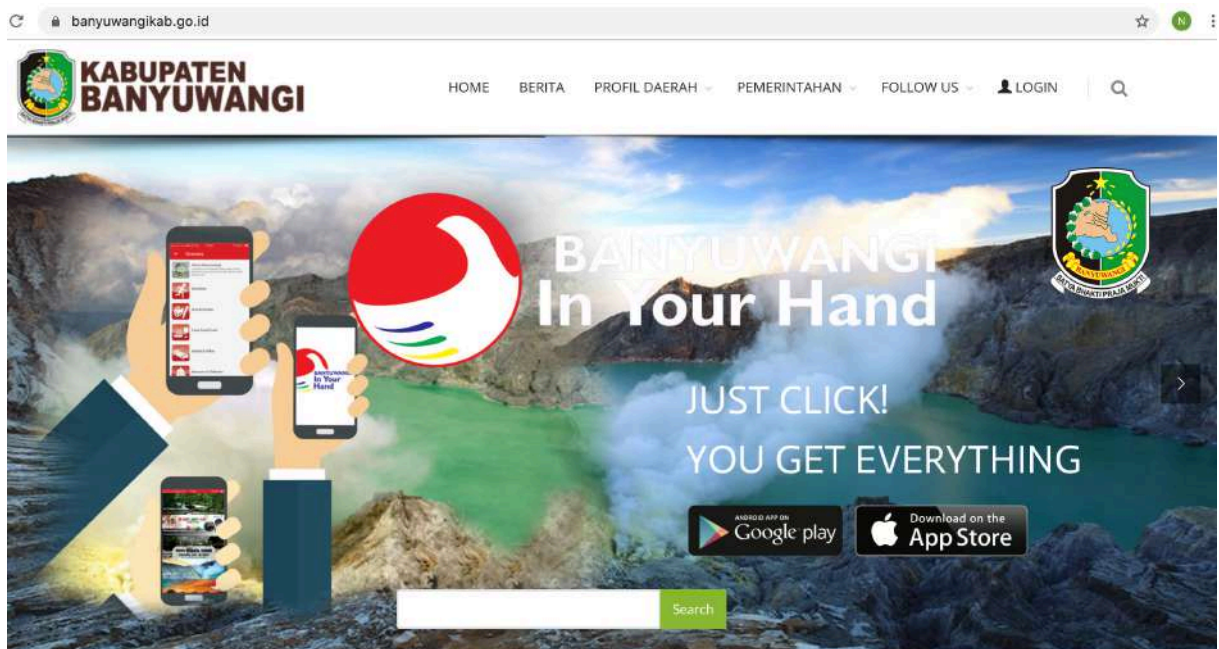
Tribun. (2019). dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/15/empat-inovasi-banyuwangi-masuk-top-99-inovasi-pelayanan-publik-dari-kemenpan-rb>. akses 16 Desember 2019.

World Bank, (1992). *Governance And Development*. Washington, Dc: World Bank

Woods, Ngaire. (2000). *The Challenge of Good governance for the IMF and the World Bank Themselves*. World Development Vol. 28, No. 5, pp. 823-841.

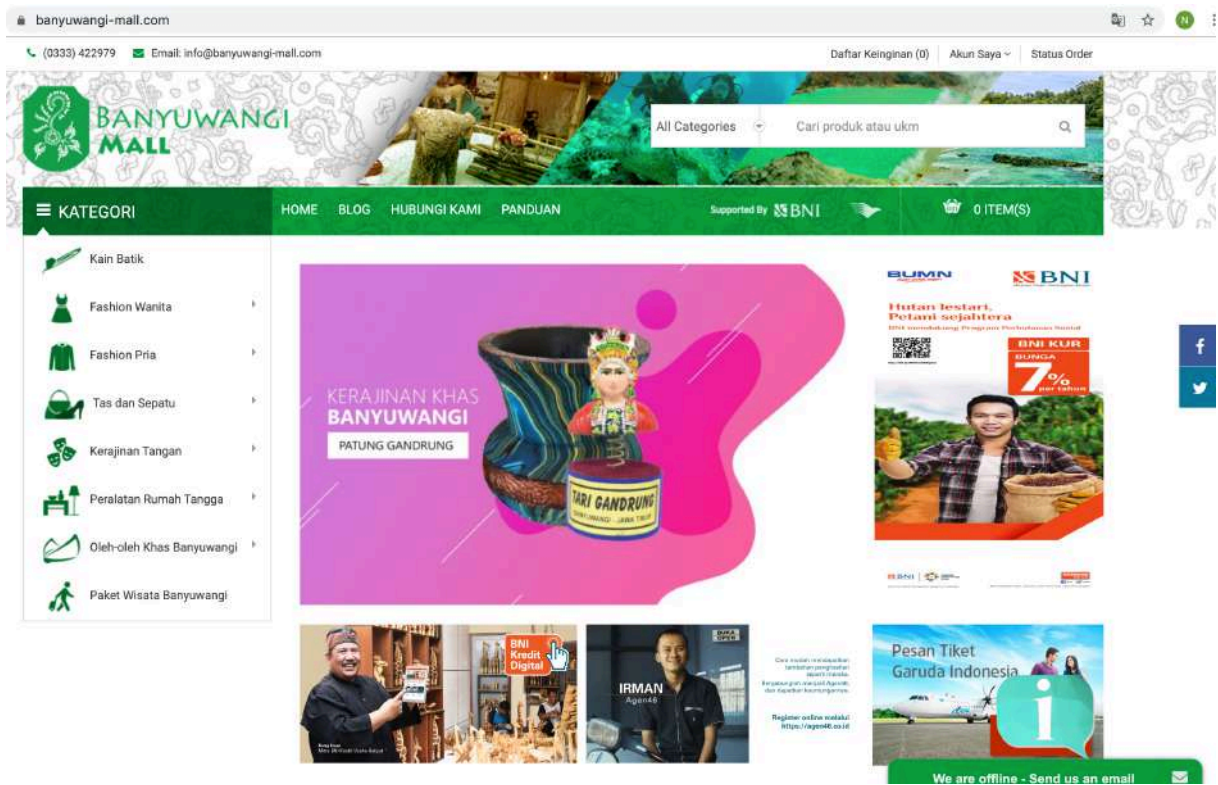
Lampiran 1

Transparansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada website tentang kebijakan dan program



Mall Banyuwangi untuk pemasaran UMKM Kabupaten Banyuwangi
website: <https://www.banyuwangi-mall.com/>

Haryono: "Reformasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi..."



Tampilan laman website <https://www.banyuwangi-mall.com/> yang merupakan salah satu pemenang top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB tahun 2019.